

Kondisi Pendidikan Dasar Menuju Lepas Landas

St. VEMBRIARTO

PENDIDIKAN dasar merupakan dasar pengembangan masyarakat. Lepas landas adalah tahap pertumbuhan masyarakat dalam mana masyarakat tersebut telah berhasil mengatasi rintangan dan hambatan pertumbuhannya, dan pertumbuhan telah berlangsung secara wajar. Masyarakat tersebut telah mampu mengembangkan dirinya atas kemampuannya sendiri sehingga pertumbuhan dapat dipertahankan secara berkesinambungan. Apa sumbangan pendidikan dasar terhadap pencapaian tahap tersebut? Bagaimanakah kondisi pendidikan dasar kita menjelang tahap lepas landas tersebut? Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan bidang pendidikan dasar untuk menyongsong tahap tinggal landas itu?

Apakah yang Dimaksud dengan Pendidikan Dasar Itu?

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, pendidikan dasar dirumuskan sebagai berikut:

”Pendidikan dasar merupakan pendidikan sembilan tahun, terdiri atas program pendidikan enam tahun di Sekolah Dasar dan program pendidikan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama” (Pasal 2). Apakah tujuan pendidikan dasar? Rumusan tujuan itu dapat dibaca pada Pasal 3 PP tersebut, sebagai berikut: ”Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warganegara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.”

Dengan demikian esensi pengertian pendidikan dasar mencakup pengertian sebagai berikut:

- a. pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan formal yang paling dasar;
- b. lama programnya sembilan tahun, terdiri atas enam tahun SD dan tiga tahun SLTP yang merupakan satu kesatuan program karena diikat oleh satu tujuan institusional pendidikan dasar;

Tabel 1

PERSENTASE PENDUDUK USIA SEKOLAH MENURUT STATUS PENDIDIKAN

Usia Sekolah	Status Sekolah			Banyaknya Penduduk Usia Sekolah
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
SD (7-12)	6,0	91,8	2,2	27.164.467
SMTP (13-15)	1,5	74,1	24,2	11.911.606
SMTA (16-18)	2,8	47,1	49,8	10.933.633
PT (19-24)	6,3	13,1	80,6	16.817.734
Jumlah	4,8	61,5	33,7	66.827.440

Sumber: Biro Pusat Statistik, Hasil Susenas 1987, Tabel 1.

c. tujuannya ganda, yaitu: (1) membekali anak didiknya untuk berkembang sebagai pribadi, warga masyarakat, warganegara, warga dunia; dan (2) mempersiapkan anak didik ke jenjang pendidikan menengah.

Dalam tahap sekarang ini, pendidikan dasar sembilan tahun sebagai kesatuan program belum terwujud. Enam tahun pendidikan pada SD dan tiga tahun pendidikan pada SLTP masih merupakan dua penggalan program yang terpisah. Sebab itu pembicaraan dalam karangan ini lebih dititik beratkan pada pendidikan dasar pada tingkat SD.

Kondisi Pendidikan Dasar

Beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan kita, yaitu pada tanggal 29 Desember 1945 Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan supaya selekas

tersebut mungkin mengusahakan pembaruan pendidikan dan pengajaran yang isinya antara lain: agar kewajiban belajar dapat dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya paling lama 10 tahun bisa terlaksana dengan sempurna dan merata.¹ Sekarang setelah 45 tahun kita merdeka, bagaimanakah keadaan anak usia SD kita yang sudah menikmati pendidikan dasar?

Berdasarkan data dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1987 status pendidikan penduduk usia sekolah kita sebagai tercantum pada Tabel 1 di atas:

Dari data tersebut dapat disimpulkan, masih ada sekitar 1,7 juta anak-anak usia SD yang tidak/belum pernah bersekolah. Apabila ditambah dengan kelompok usia sebelumnya, maka jumlah anak yang tidak/belum pernah bersekolah di SD ada berjuta-juta. Masih besarnya jumlah anak yang

¹Sumarsono Mestoko, et.al., *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman* (Jakarta: Balitbang Dikbud, 1979), hal. 95.

tidak/belum pernah mendapatkan pendidikan di SD merupakan masalah pertama yang dihadapi oleh pendidikan dasar kita.

Masalah kedua ialah ketimpangan vertikal antara jumlah SD dan jumlah SLTP. Apabila pendidikan dasar adalah pendidikan sembilan tahun yang programnya merupakan suatu kesatuan sesuai dengan tujuan institusional, maka ketimpangan vertikal tersebut harus segera diatasi. Perbandingan antara SD dan SLTP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

PERBANDINGAN ANTARA SD DAN SLTP

Jenjang Sekolah	Siswa	Guru
SD	145.571	1.134.089
SLTP	20.334	412.412

Sumber: Balitbang Dikbud, *Rangkuman Statistik Persekolahan*, 1988/1989, diambil dari Tabel 1.

Dari data tersebut dapat disimpulkan, bahwa untuk menjadikan SD dan SLTP sebagai satu kesatuan program pendidikan dasar sembilan tahun masih banyak kesenjangan yang harus diatasi, terutama: gedung, tenaga guru, dan sarana pendidikan lainnya untuk SLTP.

Masalah ketiga, masih besarnya angka putus sekolah (*drop out*) pada tingkat SD, terutama pada siswa kelas I-III. Menurut para pakar, apabila siswa putus sekolah sebelum mencapai kelas IV SD, maka kemampuan baca-tulisnya akan hilang dan yang bersangkutan akan menjadi buta huruf kembali. Putus sekolah merupakan salah satu

bentuk pemborosan pendidikan. Persentase putus sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

PERSENTASE PUTUS SEKOLAH SD
TAHUN 1984/85 - 1987/88

Tahun	Kelas		
	I	II	III
1984/1985	2,88	1,73	3,88
1985/1986	2,84	3,07	4,81
1986/1987	2,43	2,77	4,56
1987/1988	2,82	2,99	4,39

Sumber: Balitbang Dikbud., *Statistik Sekolah Dasar*, diambil dari Tabel 44.

Dari data tersebut dapat disimpulkan, bahwa angka putus sekolah secara kumulatif kelas I-III hampir mencapai 10%. Seperti dikemukakan di atas, siswa yang putus sekolah sebelum mencapai kelas IV SD cenderung akan menjadi buta huruf kembali.

Masalah keempat, angka kegagalan studi pada tingkat SD juga cukup tinggi. Apabila diamati besarnya angka kegagalan studi (tidak lulus SD) selama empat tahun berturut-turut, besarnya persentase kegagalan studi itu sebagai berikut: 1979/1980, 42%; 1980/1981, 36%; 1981/1982, 37%; dan 1982/1983, 35%. Siswa yang gagal studi terbagi menjadi dua golongan, sebagian mengulang kelas kembali, dan sebagian lagi meninggalkan sekolah. Kelompok yang gagal studi ini dengan sendirinya belum mencapai pengetahuan dan ketrampilan yang dipersyaratkan bagi siswa yang berpendidikan SD.

Masalah kelima, besarnya jumlah siswa yang mengulang kelas (*repeaters*). Statistik

tahun 1988/1989 menunjukkan, bahwa jumlah keseluruhan siswa SD yang mengulang kelas ada 2.559.068 orang. Besarnya angka mengulang kelas ini merupakan indikator dari bermacam-macam sebab: proses belajar-mengajar yang salah, kesulitan ekonomi, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, dan lain-lain. Sebagian siswa yang mengulang kelas akan menjadi bosan belajar di sekolah yang pada akhirnya mereka cenderung akan menjadi putus sekolah.

Masalah keenam, rendahnya persentase lulusan SD yang melanjutkan studinya ke SLTP. Selama empat tahun terakhir 1985/1986 - 1988/1989 persentase siswa lulusan SD yang melanjutkan studinya ke SLTP hanya berkisar antara 37-42% saja. Alasan tidak melanjutkan studi biasanya sebabnya bermacam-macam, seperti: pendidikan SD dianggap sudah cukup, tidak ada biaya, pikirannya tidak mampu, tidak ada sekolah lanjutannya, atau sekolah lanjutannya terlalu jauh lokasinya. Dengan demikian apabila pendidikan dasar sembilan tahun itu merupakan suatu kesatuan program yang merupakan tuntutan mutlak bagi semua warga negara, maka realisasinya akan menimbulkan banyak masalah.

Masalah ketujuh, kualitas guru SD yang belum sepenuhnya memuaskan. Ditinjau dari sudut kualifikasinya, masih ada sekitar 10% guru SD yang berpendidikan di bawah persyaratan minimal, yaitu berpendidikan setingkat SMTA Keguruan.

Dari berbagai macam kelemahan di atas, dapatlah disimpulkan, bahwa setelah 45 tahun kita merdeka, pelaksanaan pendidikan SD sesungguhnya masih *keropos*. Meskipun kewajiban belajar pada tingkat SD telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, namun pelaksanaannya ternyata belum mantap.

Jika pendidikan dasar itu menjadi program pendidikan sembilan tahun dan hal itu akan dijadikan kewajiban belajar, maka masalah yang kita hadapi masih sangat berat. Oleh karena pendidikan pada jenjang SD merupakan sendi dasar pendidikan rakyat, maka perbaikan pendidikan pada jenjang SD harus menjadi prioritas pertama. Prioritas perbaikan pendidikan pada jenjang SD itu sedikitnya mencakup usaha-usaha sebagai berikut:

- a. peningkatan kualifikasi guru,
- b. peningkatan kualitas proses belajar-mengajar di kelas,
- c. memperkecil jumlah tinggal kelas (*repeaters*),
- d. memperkecil angka putus sekolah,
- e. perbaikan sarana dan prasarana pendidikan,
- f. memperbesar persentase kelulusan.

Mengapa pendidikan jenjang SD perlu mendapatkan prioritas utama untuk menyongsong lepas landas? Apa peranan pendidikan SD sebagai dasar pengembangan masyarakat?

Mengapa Pendidikan SD Harus Menjadi Prioritas?

Pada awal masa pembangunan kita, pendidikan lebih dipandang sebagai instrumen pembangunan daripada sebagai tujuan pembangunan. Sebab itu kebijakan pendidikan pada waktu itu lebih dititik beratkan pada pendidikan tingkat menengah sebagai penghasil tenaga kerja yang secara langsung dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Kebijakan semacam itu dalam perencanaan pendidikan (*educational planning*) disebut pendekatan tenaga kerja (*manpower approach*). Kebijakan semacam itu telah kita

tinggalkan sejak kita mencanangkan kewajiban belajar pada tingkat SD. Salah satu kelemahan pendekatan tenaga kerja dalam perencanaan pendidikan ialah bahwa pendidikan sekolah hanya dipandang sebagai *alat* pembangunan. Padahal pendidikan sekolah itu sendiri merupakan *tujuan* pembangunan. Prioritas yang diletakkan pada pendidikan tingkat menengah jelas akan menelantarkan pendidikan SD. Pendidikan sekolah itu mempunyai tiga tujuan, yaitu: (1) mendidik anak sebagai calon warga negara; (2) mendidik anak sebagai calon pekerja; dan (3) mendidik anak sebagai manusia.² Pendekatan tenaga kerja, lebih-lebih yang prioritasnya diletakkan pada pendidikan menengah jelas akan mengabaikan tujuan pertama dan ketiga tersebut di atas. Suatu penelitian di India menunjukkan, bahwa pembiayaan yang diperlukan untuk mendidik seorang *undergraduate* dalam *arts* dan *sciences* sama besarnya dengan pembiayaan untuk 22 orang siswa SD tiap tahunnya, dan seorang *MSc.* pembiayaannya sama dengan 89 orang siswa SD tiap tahunnya.³ Suatu penelitian yang dilakukan di Indonesia beberapa waktu yang lalu hasilnya menunjukkan, bahwa pembiayaan untuk seorang siswa SLTP kira-kira empat kali, untuk siswa SLTA kira-kira lima kali jika dibandingkan dengan pembiayaan untuk siswa SD tiap tahunnya.⁴

Menurut suatu penelitian negara-negara yang mencapai taraf pertumbuhan ekonomi yang mengesankan mula-mula mengutama-

²I.L. Kandel, *Raising the School Leaving Age*, Unesco, Paris (1951), hal. 47.

³Eugene Staley, *Relating Primary Secondary Education to Development*, diperbanyak oleh Badan Pengembangan Pendidikan, Jakarta (1979), hal. 2.

⁴Kartomo Wirohardjo, et.al., *Pendidikan untuk Pembangunan* (Jakarta: Badan Pengembangan Pendidikan Departemen P dan K, 1971), hal. 5.

kan perluasan pendidikan dasar, langkah berikutnya pendidikan menengah, barulah pada tahap terakhir memperluas *enrollment* pada tingkat pendidikan universitas, misalnya saja Jepang. Persentase *school attendance* untuk jenjang SD di Jepang sejak tahun 1900 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
PERSENTASE "SCHOOL ATTENDANCE"

Tahun	Persentase 'School Attendance' Tingkat SD di Jepang
1900	81,40
1901	91,57
1905	97,72
1910	98,83
sesudah itu lebih dari	99,00 tiap-tiap tahunnya

Sumber: Tokiomi Kaigo, *Education in Japan* Vol. II, hal. 33.

Jadi Jepang membangun pendidikannya dari dasarnya. Kiranya kebijakan semacam itu perlu kita pertimbangkan. Mengabaikan pendidikan pada tingkat SD mengandung kelemahan-kelemahan pokok sebagai berikut:

1. hal itu berarti mengabaikan mayoritas anak didik yang harus dibina sebagai calon warga negara dan sebagai manusia,
2. pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi kehilangan basisnya yang kuat,
3. dalam negara yang sedang membangun sebagian terbesar rakyat hidup dalam sektor tradisional yang memerlukan pekerja-pekerja yang *unskilled* dan *semi-skilled*,

4. pengereman laju pertumbuhan penduduk melalui usaha keluarga berencana akan gagal tanpa dibarengi dengan usaha peningkatan pendidikan rakyat secara meluas.

Sekolah Dasar sekarang yang terletak di pelosok-pelosok merupakan tempat pendidikan rakyat jelata, tempat membina calon warga negara, calon pekerja, dan mengembangkan anak didik sebagai manusia.

Peranan Pendidikan Dasar pada Jenjang SD

Masyarakat yang mulai tumbuh dan membangun atas kemampuannya sendiri menuntut partisipasi anggotanya, baik yang bersifat reseptif maupun kreatif. Reseptif artinya, warga masyarakat itu mampu menyerap berbagai informasi baik yang lisan maupun tertulis yang sangat diperlukan bagi pengembangan kehidupannya. Kreatif, artinya warga masyarakat tersebut mampu melihat dan menggunakan setiap peluang yang dimilikinya untuk berkarya. Tuntutan tersebut tidak mungkin terpenuhi apabila sebagian warga masyarakat itu masih buta huruf. Penelitian-penelitian menunjukkan, bahwa pendidikan sekolah merupakan konteks berkembangnya sikap modernisasi.

Sosiolog David Popenoe mengemukakan, bahwa pendidikan sekolah mempunyai empat macam fungsi hakiki, yaitu: (1) transmisi kebudayaan masyarakat; (2) menolong individu memilih dan melakukan peranan sosialnya; (3) menjamin integrasi sosial; dan (4) sebagai sumber inovasi sosial.⁵ Inovasi sosial ini tidak saja dilakukan oleh perguruan tinggi melalui *basic* dan *applied re-*

search-nya yang disumbangkannya kepada masyarakatnya, melainkan juga dilakukan oleh sekolah menengah dan sekolah dasar, bahkan oleh taman kanak-kanak sekalipun.

Melalui pendidikan SD anak didik mendapatkan kemampuan baca tulis, pengetahuan umum, kemampuan berkomunikasi secara verbal maupun numerik, sikap dan orientasi nilai, serta cara kerja yang sistematis "ilmiah." Semuanya itu merupakan bekal yang sangat asasi bagi warga masyarakat modern.

Pengetahuan tentang hewan dan tumbuh-tumbuhan yang dipelajari seseorang melalui pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SD memberikan kepadanya orientasi tentang tanaman pertanian, hama, dan pupuk. Demikian pula pelajaran matematika dan ilmu alam memberikan orientasi sikap rasional dalam bertindak serta kemampuan untuk melakukan analisis *cost and benefit* sederhana. Demikian cara belajar formal selama enam tahun di SD memberikan sikap dan kebiasaan cara kerja yang sistematis dan terjadwal. Ternyata ada perbedaan yang sangat berarti dalam hal peningkatan produktivitas dan tingkat pendapatan antara petani-petani yang berpendidikan SD jika dibandingkan dengan petani-petani yang buta huruf. Ini merupakan sumbangan nyata dari pendidikan SD, sumbangan mana sangat substansial jika dibandingkan dengan sumbangan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Masyarakat industri modern adalah masyarakat demokratik yang bersifat terbuka. Masyarakat demokratik menuntut partisipasi sosial dan politik warganya dalam kehidupan negara. Partisipasi sosial politik ini menuntut informasi lisan dan tertulis yang diperlukan untuk memahami dan menilai situasi. Untuk dapat menyerap dan menilai informasi itu diperlukan dasar pengetahuan

⁵David Popenoe, *Sociology* (New York: Appleton Century Crofts, 1971), hal. 319-329.

umum yang cukup. Pelajaran Pancasila, Kewargaan Negara, Ilmu Pengetahuan Sosial yang dipelajari seseorang di SD mempunyai sumbangan penting. Dengan bekal kemampuan baca tulis dan pengetahuan umum itu seseorang dapat terlibat secara aktif dalam arus informasi yang membanjiri masyarakatnya.

Pengetahuan tentang proses biologik, khususnya proses reproduksi pada tumbuh-tumbuhan dan hewan yang dipelajari melalui Ilmu Pengetahuan Alam memberikan landasan pemahaman tentang proses reproduksi manusia. Pengetahuan itu akan memberikan landasan yang rasional tentang fungsi alat-alat kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana. Dengan demikian adopsi terhadap program KB tidak semata-mata didasarkan pada instruksi pamong desa, rasa takut kepada pemerintah, atau *pakewuh* dengan tetangga sekitar, melainkan benar-benar didasarkan pemahaman yang wajar tentang urgensi KB tersebut. Penelitian-penelitian menunjukkan, bahwa ibu-ibu yang mengalami pendidikan sekolah cenderung memperlihatkan penurunan fertilitas, serta penurunan mortalitas bayi dan anak pula.⁶ Dengan demikian ibu-ibu yang berpendidikan sekolah lebih serius dan bertindak efektif dalam menjaga kelangsungan hidup anaknya, mengembangkan anaknya dalam lingkungan yang lebih baik, serta dengan jumlah anak yang lebih kecil memungkinkan baginya memberikan pendidikan yang lebih baik.⁷ Dengan demikian pen-

didikan sekolah, setidak-tidaknya tingkat SD, tidak saja berarti meningkatkan kualitas pendidikan rakyat, tetapi juga berperan besar dalam mengerem laju pertumbuhan penduduk. Sudah dapat dipastikan, bahwa KB (*Keluarga Berencana*) tidak akan berhasil tanpa KB (*Kewajiban Belajar*) lainnya.

Pendidikan sekolah, setidak-tidaknya pada jenjang SD, ternyata mempengaruhi, sikap, gaya, dan tingkah laku keibuan (*maternal behaviour*) seorang ibu terhadap anak-anaknya. Ibu yang berpendidikan sekolah lebih bersifat pedagogikal dan konversasional dalam pergaulan dengan anak-anaknya. Selama enam tahun belajar di SD anak dibiasakan berinteraksi sosial dengan teman-teman sebayanya, serta bertanya-jawab dan berdialog dengan guru-gurunya. Pola-pola tingkah laku ini secara tidak sadar menjadi cara hidupnya yang baru. Kelak apabila dia menjadi orangtua (ibu atau ayah) pola-pola hubungan konversasional ini secara tidak sadar akan diterapkan pula dalam pergaulan dengan anak-anaknya. Penjelasan tersebut disebut teori imitasi atau identifikasi. Menurut teori itu, situasi belajar-mengajar di kelas memperkenalkan kepada anak didik suatu pola interaksi sosial yang baru, yaitu interaksi antara orang dewasa dan anak, dalam mana orang dewasa mengajukan pertanyaan/persoalan dan anak harus menjawabnya untuk mempragakan pengetahuannya. Guru akan memberikan pujian apabila jawabannya benar, dan akan memberikan koreksi apabila jawabannya salah. Pola ini secara tidak sadar akan diadopsi anak setelah mereka menjadi orangtua, dan diterapkan dalam pergaulannya dengan anak-anaknya.

Seperti telah dicontohkan di depan, Jepang sebagai negara Asia yang mampu mencapai kemajuan sosial ekonomi yang sangat

⁶Robert A. LeVine, et.al., "Schooling and Maternal Behaviour in a Mexican City: The Effects on Fertility and Child Survival," *Research Notes* No. 16 (February 1987), hal. 6.

⁷Robert A. LeVine, "Influences of Women's Schooling on Maternal Behaviour in the Third World," *Comparative Education Review* 24 No. 2 (June 1980), hal. 308.

mengesankan, ternyata membangun pendidikannya dari *dasarnya*, yaitu pendidikan sekolah dasar. Sejak tahun 1910 Jepang praktis telah selesai dengan kewajiban belajar untuk pendidikan enam tahun sekolah dasar. Atas landasan pendidikan dasar yang kokoh itu barulah dikembangkan pendidikan menengah dan pendidikan tingginya. Kiranya kebijakan dasar yang sudah terbukti berhasil itu patut pula kita perhatikan. Pendidikan dasar pada jenjang SD harus benar-benar menjadi dasarnya seluruh struktur bangunan pendidikan formal. Ini berarti, bahwa pendidikan dasar pada jenjang SD itu harus: (a) menampung 100% anak usia SD; dan (b) benar-benar memiliki kualitas yang tinggi, dan tidak keropos. Pendidikan dasar yang demikian akan mempunyai dua peranan penting: (a) menjadi landasan yang kuat untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi; dan (b) memberikan bekal kemandirian anak untuk belajar seumur hidup. Berdasarkan pengamatan atas kondisi pendidikan SD kita pada saat ini seperti telah diuraikan di atas, tampaknya SD kita saat ini sebagian masih belum memenuhi ukuran seperti yang diinginkan tadi. Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk perbaikannya?

Prospek

Dari pembicaraan di atas, urgensi pendidikan dasar pada jenjang SD untuk menyongsong tahap tinggal landas sudahlah jelas. Langkah-langkah apa saja yang dapat menjadikan SD sebagai pendidikan dasar yang *solid* untuk memasuki abad XXI mendatang?

Dalam hubungan ini ada lima saran yang dikemukakan di sini, yaitu:

1. Berdasarkan PP No. 28 Tahun 1990, pendidikan dasar adalah pendidikan sembilan tahun yang terdiri atas: enam tahun SD dan tiga tahun SLTP yang merupakan satu kesatuan program yang diikat oleh *satu tujuan institusional*. Oleh karena ternyata pendidikan SD kita masih keropos, maka kiranya dalam jangka 10 tahun mendatang prioritas diletakkan pada usaha menjadikan pendidikan SD benar-benar *solid*, artinya:
 - a. SD benar-benar telah menampung 100% anak usia SD secara terus-menerus tiap-tiap tahunnya,
 - b. angka putus sekolah telah berhasil ditekan sekecil mungkin,
 - c. angka mengulang kelas telah berhasil ditekan sekecil mungkin,
 - d. angka kegagalan studi (tidak lulus) telah berhasil ditekan sekecil mungkin pula,
 - e. angka melanjutkan studi ke jenjang SLTP telah dapat ditingkatkan sebesar mungkin, bahkan semua lulusan SD diusahakan 100% tertampung di SLTP,
 - f. mutu proses belajar-mengajar telah ditingkatkan sedemikian rupa sehingga pendidikan SD benar-benar berkualitas tinggi.

Apabila tahap ini telah tercapai, maka perwujudan pendidikan dasar sembilan tahun dapat diterapkan kepada semua anak.

2. Dalam jangka waktu 10 tahun mendatang perlu dikembangkan SLTP sesuai dengan jumlah dan mutu sebagai perwujudan pendidikan dasar sembilan tahun. Ketimpangan vertikal yang besar antara jumlah SD dengan jumlah SLTP harus diserasikan dahulu sebelum pendidikan dasar sembilan tahun merupakan tun-

- tutan. Pengembangan yang paling urgen untuk SLTP adalah: gedung sekolah, guru, dan sarana pendidikan.
3. Perlu dilakukan reorganisasi kurikulum SD dan SLTP sedemikian rupa sehingga kurikulum keduanya menjadi *satu kesatuan program pendidikan dasar sembilan tahun*. Pada saat ini kurikulum SD dan SLTP masing-masing masih merupakan kurikulum yang berdiri sendiri. Di antara keduanya terdapat sangat banyak bidang/materi pelajaran yang bersifat duplikasi, tumpang tindih, dan ketidakserasian dalam mendukung *satu tujuan institusional* pendidikan dasar. Pembenahan kurikulum ini tidak mudah, dan oleh karenanya harus telah beres sejak sekarang.
 4. Untuk menghadapi tantangan abad XXI mendatang, harus telah ditetapkan sejak sekarang bahwa guru untuk pendidikan dasar haruslah memiliki kualifikasi pendidikan sarjana (S1). Guru-guru tersebut harus dipersiapkan melalui pendidikan pada institusi pendidikan guru yang *terpilih, jumlahnya dibatasi, pendidikannya dikontrol ketat dengan disiplin yang tinggi* sehingga lulusan secara profesional baku. Guru-guru yang berpendidikan gaya baru ini harus diprioritaskan untuk ditempatkan di daerah-daerah pelosok dan terpencil untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar secara berarti. Guru-guru yang berpendidikan sarjana ini diharapkan secara profesional mandiri. Dia akan mampu belajar sendiri dengan menggunakan segala peluang yang ada di masyarakat sekitarnya. Dengan demikian guru-guru dengan kualifikasi seperti itu hampir-hampir tidak memerlukan penataran-penataran lagi. Ini akan berarti penghematan biaya pendidikan yang sangat besar. Peningkatan kemampuan profesionalitas guru-guru tersebut dapat dilakukan melalui bahan-bahan tertulis yang dikirimkan secara berkala kepada mereka dalam bentuk jurnal atau majalah.
 5. Dengan mengisi pendidikan dasar dengan guru-guru yang berkualifikasi sarjana, maka SD dan SLTP dapat menjadi pusat pengembangan masyarakat di sekitarnya. Apabila Puskesmas dapat menjadi pusat pengembangan masyarakat dalam bidang gizi, kesehatan lingkungan, dan KB, maka SD dan SLTP akan berperanan sebagai pusat pengembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Balitbang Dikbud. *Rangkuman Statistik Persekolahan*, Jakarta, 1989.
- Balitbang Dikbud. *Statistik Sekolah Dasar*, Jakarta, 1989.
- Biro Pusat Statistik. *Statistik Pendidikan, Susenas 1987*, Jakarta, 1989.
- Kandel, I.L. *Raising the School-Leaving Age*. Unesco, Paris, 1951.
- Wirosuhardjo, Kartomo et.al. *Pendidikan untuk Pembangunan*. Jakarta: Badan Pengembangan Pendidikan Departemen P dan K, 1971.
- LeVine, Robert A. "Influences of Women's Schooling on Maternal Behavior in the Third World," *Comparative Education Review* 24 No. 2 (June 1980).
- LeVine, Robert A. "Schooling and Maternal Behavior in a Mexican City: The Effects on Fertility and

Child Survival," *Research Notes* No. 16 (February 1987).

Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990.

Popenoe, David. *Sociology.* New York: Appleton Century Crofts, 1971.

Mestoko, Sumarsono et.al. *Pendidikan di Indonesia*

dari Jaman ke Jaman. Balitbang Dikbud, Jakarta, 1979.

Staley, Eugene. *Relating Primary Secondary Education to Development.* Diperbanyak oleh Badan Pengembangan Pendidikan, Jakarta, 1971.

Kaigo, Tokiomi. "Primary Education After the Meiji Era," *Education in Japan* Vol. II, The International Educational Research Institute Hiroshima University, Hiroshima, 1967.



...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...